KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

tokopedia

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN INVESTASI/

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN

PT. TOKOPEDIA

TENTANG

SINERGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA

NOMOR: 3/P/A.7/2024

NOMOR: TKPD/LEGAL/III/2024/001

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-03-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RIYATNO, berkedudukan dan berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. ASTRI WAHYUNI, berkedudukan dan berkantor di Tokopedia Tower Ciputra World 2, Jl. Prof. DR. Satrio No. 11, Setia Budi, Jakarta Selatan, 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tokopedia selaku *Senior Vice President of Public Policy and Government Relations*, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 012/SKL/LGL/03/2019 tanggal 12 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 6 Februari 2009, yang bergerak di bidang pengoperasian *portal web* www.tokopedia.com guna menyediakan platform untuk perdagangan pasar secara daring (*online marketplace*) dengan nama "Tokopedia". Salah satu program dari PIHAK KEDUA adalah adalah mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("**UMKM**") dan perorangan untuk mengembangkan usaha dan memasarkan produk secara daring, serta pengembangan inovasi untuk mendukung pelayanan publik; dan

c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku usaha khususnya UMKM pasar rakyat di era teknologi informasi, PARA PIHAK perlu melakukan pengembangan terhadap pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selanjutnya disebut UMKM.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Digital di Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk mendukung percepatan pengembangan bagi pelaku usaha khususnya UMKM berbasis digital dalam pengembangan daya saing.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang baik di antara PARA PIHAK dalam upaya mendukung program Pemerintah melalui PIHAK PERTAMA, dengan memanfaatkan aplikasi dan/atau layanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA beserta afiliasinya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. sosialisasi informasi perizinan berusaha bagi UMKM;

b. fasilitasi perizinan berusaha bagi UMKM;

c. fasilitasi penyelesaian hambatan perizinan berusaha bagi UMKM;

d. pengembangan UMKM berbasis digital dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing; dan

e. kerja sama lain yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK secara tertulis.

PASAL 3

SOSIALISASI INFORMASI PERIZINAN BERUSAHA BAGI UMKM

(1) Kerja sama sosialisasi informasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, *focus group discussion*, penyediaan sarana sosialisasi cetak dan elektronik, atau kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur standar dan ketentuan dari Pihak Kedua, akan berperan dalam sosialisasi informasi perizinan berusaha sesuai dengan materi dan/atau informasi yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Kegiatan sosialisasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:

a. sosialisasi peraturan pelaksanaan dan prosedur perizinan berusaha bagi UMKM termasuk pelaksanaan uji coba sistem *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS-RBA); dan/atau

b. pertukaran informasi terkait penyelesaian hambatan yang dihadapi UMKM dalam permohonan perizinan berusaha.

(4) Kegiatan sosialisasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lainnya sesuai dengan kompetensinya berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA BAGI UMKM

(1) Kerja sama fasilitasi perizinan berusaha bagi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh Pihak Pertama melalui kegiatan konsultasi dan pendampingan dalam proses penyelesaian permasalahan perizinan berusaha kepada UMKM berbasis digital yang telah bermitra dengan PIHAK KEDUA.

(2) Kegiatan konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pihak Pertama dalam bentuk pertemuan tatap muka di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun secara virtual dalam rangka penanganan permasalahan terkait permohonan perizinan berusaha di sistem OSS-RBA.

PASAL 5

FASILITASI PENYELESAIAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI UMKM

(1) Kerja sama fasilitasi penyelesaian hambatan perizinan berusaha bagi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dilaksanakan dengan melakukan survei baik *online* maupun kunjungan langsung ke lokasi UMKM berbasis digital yang telah bermitra dengan PIHAK KEDUA yang mengalami permasalahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka fasilitasi penyelesaian hambatan perizinan berusaha bagi UMKM.

PASAL 6

PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS DIGITAL

DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI DAN DAYA SAING

(1) Kerja sama pengembangan UMKM berbasis digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing, melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a. kolaborasi dukungan pendaftaran UMKM yang direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam aplikasi yang dikelola oleh PIHAK KEDUA; dan/atau

b. kolaborasi dukungan akses terhadap pelatihan untuk peningkatan kompetensi UMKM yang direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA;

(2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK melalui kegiatan seminar baik secara *online* ataupun *offline*.

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2, dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

(2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kapasitas masing-masing PIHAK, serta ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(4) Apabila selama pelaksanaan kerja sama ini terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masing-masing PIHAK bertanggung jawab sendiri untuk setiap kelalaian yang ditimbulkannya termasuk klaim dan tuntutan pihak lain kepadanya.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang membuat tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

(4) Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Nota Kesepahaman ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselesaikan melalui mediasi oleh mediator yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12

KERAHASIAAN

(1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang diperoleh dan dihasilkan dari, serta yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini ("**Informasi Rahasia**") harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh Informasi Rahasia tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika Informasi Rahasia tersebut:

a. telah disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK untuk disampaikan kepada pihak lain, termasuk kepada grup/afiliasi atau kantor perwakilan masing-masing PIHAK;

b. telah dibuka kepada umum oleh PIHAK pemilik Informasi Rahasia;

c. harus disampaikan kepada suatu pihak lain berdasarkan:

   i. ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

   ii. suatu penetapan atau putusan pengadilan atau arbitrase;

   dengan ketentuan bahwa sebelum menyampaikan kepada pihak lain tersebut, PIHAK yang akan menyampaikan Informasi Rahasia kepada pihak lain wajib terlebih dahulu memberitahukan rencana penyampaian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

(2) Masing-masing PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian Informasi Rahasia yang diperoleh dari PIHAK lain dalam bentuk apa pun dan untuk keperluan apa pun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Masing-masing PIHAK wajib memastikan bahwa seluruh anggota direksi, pegawai, penasihat dan/atau pihak terafiliasi dari PIHAK dimaksud mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana ditentukan oleh Nota Kesepahaman ini dan PARA PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan kegagalan anggota direksi, pegawai, penasihat dan/atau pihak terafiliasi dari PARA PIHAK untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia.

(4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dalam hal Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 13

KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Dalam melaksanakan kegiatan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, maupun dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7, masing-masing PIHAK tidak dapat menggunakan logo atau merek dagang maupun kekayaan intelektual lain milik PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK pemilik kekayaan intelektual tersebut.

(2) Tidak ada pengalihan dan/atau penyerahan hak kekayaan intelektual apapun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan seluruh kekayaan intelektual milik suatu PIHAK tetap menjadi milik PIHAK tersebut.

(3) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dalam hal Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 14

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 15

ADENDUM

(1) Nota Kesepahaman dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur secara tertulis dalam perubahan atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 16

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

Penghubung	:	Direktorat Kerja Sama Bilateral
Alamat	:	Kementerian Investasi/BKPM, Gedung Suhartoyo, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190
Email	:	tu.ditksb@bkpm.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Penghubung	:	*Public Policy and Government Relations* Tokopedia
Alamat	:	Tokopedia Tower Ciputra World 2, Lantai 52, Jl. Prof. DR. Satrio No. 11, Setia Budi, Jakarta Selatan, 12950
Email	:	government.relation@tokopedia.com

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing PIHAK berdasarkan informasi yang dimaksud pada ayat (1).

PASAL 17

NON EKSKLUSIVITAS

Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif, sehingga masing-masing PIHAK berhak untuk melakukan kerja sama serupa dengan pihak ketiga lainnya.

PASAL 18

KETENTUAN LAIN

Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pimpinan, para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 19

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM	**PT TOKOPEDIA**
RIYATNO	**ASTRI WAHYUNI**